



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN I 2020



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020



PUNG NUGROHO SAKSONO
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan I 2020 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan I 2020.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2020.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada triwulan I 2020 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan.

Penyusunan LKj Triwulan I 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Semoga di masa mendatang kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan.

Jakarta, 13 April 2020

Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada

Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan I 2020

1. Kasubdit Infrastruktur;
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat POA;
3. Ikrom Bungsu, S.Pi

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Triwulan I 2020

1. Agus Dwiyanto, ST, M.Ling
2. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
3. Putu Pinandytha Bagus Rinata, S.Kel
4. Bilmantasya, ST

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	15
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	21
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	19
Perjanjian Kinerja 2020	20
Pengukuran Capaian Kinerja	23

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan I 2020	25
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	27
Sasaran Kegiatan 1	27
Sasaran Kegiatan 2	28
Sasaran Kegiatan 3	34
Sasaran Kegiatan 4	37
Sasaran Kegiatan 5	45
Sasaran Kegiatan 6	47
Sasaran Kegiatan 7	48
Sasaran Kegiatan 8	49
Sasaran Kegiatan 9	52
Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	53

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan I 2020	7
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020	21
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020.....	22
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2020	25
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode triwulan I 2020.....	27
Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode triwulan I 2020.....	28
Tabel 7. Target dan realisasi IKU-3 periode triwulan I 2020.....	29
Tabel 8. Daftar armada kapal pengawas Ditjen PSDKP Tahun 2020	29
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU-4 periode triwulan I 2020	30
Tabel 10. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli periode I 2020.....	30
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan I 2020	32
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan I 2020	33
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan I 2020	34
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan I 2020	35
Tabel 15. Progress pembangunan prasarana pengawasan	35
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan I 2020	37
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan I 2020	37
Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan I 2020	38
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan I 2020	39
Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-13 Periode Triwulan I 2020	40
Tabel 21. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2015-2020.....	40
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-14 Periode Triwulan I 2020	41
Tabel 23. Hasil Operasi Speedboat Periode Triwulan I 2020.....	41
Tabel 24. Capaian hari operasi speedboat pengawas 2019-2020	41
Tabel 25. Target dan realisasi IKU-15 periode triwulan I 2020.....	42
Tabel 26. Rincian pelaksanaan operasi udara sd Maret 2020	42
Tabel 27. Rincian target dan realisasi IKU-16 periode triwulan I 2020.....	45
Tabel 28. Target dan realisasi IKU-18 periode triwulan I 2020.....	46
Tabel 29. Target dan realisasi IK-21 periode triwulan I 2020	49
Tabel 30. Target dan realisasi IK-23 periode triwulan I 2020	50
Tabel 31. Target dan realisasi IK-28 periode triwulan I 2020	52
Tabel 32. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Maret 2020	54
Tabel 33. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA 2018-2020	55
Tabel 34. Dukungan Anggaran Terhadap Sasaran Kegiatan (SK) Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020.....	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	15
Gambar 2. Kapal Squid Jigging di WPPNRI 718	43
Gambar 3. Kapal Squid Jigging di WPPNRI 718	43
Gambar 4. Pemantauan Pulau Semau (PMA)	44
Gambar 5. Pemantauan Pesisir Pulau Mangudu (PMA)	44
Gambar 6. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2020	53
Gambar 7. Grafik efisiensi penggunaan anggaran terhadap Indikator Kinerja	57

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I 2020. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud, Direktorat POA telah menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja (IK). Target pencapaian IKU/IK periode triwulan I 2020 sebanyak 11 IKU/IK, sebanyak 10 IKU/IK telah memenuhi target dan hanya 1 IK yang belum memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk triwulan I 2020 mencapai 98.51% atau meningkat cukup signifikan dari tahun triwulan I 2019 sebesar 102.29%.

Berbagai kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan I 2020 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya satu target IK yaitu IK: “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran” dari target **87.00%** tercapai sebesar **79.24%**, hal ini menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat POA pada periode triwulan II 2020.

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan triwulan I 2020 telah melaksanakan 11 output kegiatan dalam APBN Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2020. Pagu Direktorat POA sebesar Rp270.134.837.000 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Realisasi anggaran Direktorat POA triwulan I 2020 sebesar **Rp23.995.645.513** atau **8.88%** dari pagu **Rp270.134.837.000**. Realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari periode triwulan I 2019 (**Rp28.108.210.166**), rendahnya realisasi anggaran ini turut dipengaruhi oleh beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu pengesahan beberapa kali proses revisi DIPA Satker Direktorat POA.

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan triwulan I 2020 berdasarkan prinsip *budget follow* program secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode triwulan I 2020 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan I 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1		1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	-	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	-	-	-
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	9	17,78	197.56
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	12	17,51	145.92
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	0,40	0,49	122.50
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	-	-	-
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (Unit)	-	-	-
		8	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun (Unit)	-	-	-
		9	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun (Unit)	-	-	-
		10	Jumlah amada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	-	-	-
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-
		12	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	-	-	-
		13	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	25	29	116.00
		14	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	3	4	133.33
		15	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	25	28	112.00
		16	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	-	-	-
5	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	-	-	-
		18	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75	80	106.67

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		19	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-
6	Terselenggaranya penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP	20	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	-	-	-
7	Terselenggaranya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	65	85	130.77
8	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-
		23	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	15	27.90	186
		24	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-
		25	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Direktorat POA (%)	-	-	-
		26	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (Indeks)	-	-	-
		27	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA (Inovasi)	-	-	-
9	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	28	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	87	79.24	91.08
		29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat POA dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat POA tahun sebelumnya (%)	-	-	-
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						98.51%

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2020

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin dimanfaatkannya SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA triwulan I 2020 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode triwulan I 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA triwulan I 2020 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Indonesia memiliki luas total sebesar 7.81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan dan 2.55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ditambah dengan adanya perbatasan laut dengan 10 negara tetangga antara lain: India, Thailand, Republik Palau, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, dan Vietnam. Hal ini menjadi tantang tersendiri. Mengingat potensi terjadinya klaim wilayah, masuknya nelayan dari negara lain di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Dibutuhkan kesiapan armada pengawasan khususnya Kapal Pengawas Perikanan yang memiliki daya jelajah sampai ZEE, kesiapan personil, penerapan teknologi terkini, dan kolaborasi antar instansi maupun antar negara.

Selain itu, tantangan lainnya adalah, masih ditemukannya pelaku IUU *fishing* yang kembali tertangkap oleh petugas, hal ini mengindikasikan belum maksimalnya efek jera terhadap para pelaku IUU *fishing*. Disamping itu berkembangnya modus operandi pelaku IUU *fishing* serta implementasi dari kebijakan pimpinan terkait pelarangan alat tangkap tertentu.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

PRAKTIK ILLEGAL FISHING TETAP MARAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Situasi pandemic Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan juga turut meningkat. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*. Keamanan Awak Kapal Pengawas menjadi hal utama, khususnya dalam hal perlindungan diri, sehubungan dengan hal tersebut Direktorat POA telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk AKP seperti pengadaan masker, handsanitizer, thermo gun, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Hal ini semata-mata untuk menjaga personil tetap sehat dalam rangka melakukan pengawasan SDKP.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari,

karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Direktorat POA dalam rangka memfasilitasi keberadaan POKMASWAS ini telah mengalokasikan anggaran ke daerah melalui alokasi dana DEKONSENTRASI, tahun 2019 sebesar Rp2,323,075,000 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi pembinaan terhadap POKMASWAS. Selain itu, dalam rangka memberi apresiasi dan memupuk semangat masyarakat untuk secara sukarela melakukan pengawasan SDKP di lapangan, Ditjen PSDKP melalui Direktorat POA melakukan penilaian dan menetapkan POKMASWAS teladan tingkat nasional dan diberi penghargaan dan apresiasi.

KAJIAN LAIK OPERASI ARMADA KAPAL PENGAWAS

Keberhasilan terhadap pengawasan SDKP tidak luput dari armada kapal pengawas yang laik operasi. Kajian dilakukan untuk evaluasi kelaikan kapal pengawas yang berusia lebih dari 10 tahun, khususnya material *fiberglass* dalam rangka menjaga keselamatan Awak Kapal Pengawas (AKP) dan mengetahui kesiapan kapal bertugas di laut. Berdasarkan hasil kajian dengan menilai beberapa aspek (keselamatan, teknis, dan operasional). Dari 34 unit kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP, 6 unit kapal pengawas dinilai tidak laik operasi di laut yaitu: (1) KP. Takalamungan, (2) KP. Padaido, (3) KP. Todak 01, (4) KP. Todak 02, (5) KP. Barracuda 01, dan (6) KP. Barracuda 02. Dari 6 unit kapal pengawas tersebut, bermaterial *fiberglass*.

HIBAH KAPAL PENGAWAS DARI PEMERINTAH JEPANG PERKUAT ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal sebanyak 2 unit yaitu “Hakurei Maru” dan “Shirahagi Maru”. Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan rencana hibah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu : Ditjen PSDKP, BPPT dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 26 s.d 29 November 2019 di Jepang. Untuk memastikan kapal dalam kondisi baik, telah dilakukan survey

Direncanakan pengiriman ke Indonesia pada tahun 2022, karena pada tahun 2020 masih periode akhir penugasan kapal tersebut di Jepang. Agenda perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2021, sehingga baru tahun 2022 kapal tersebut dikirim ke Indonesia.

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengecekan langsung oleh Tim, kedua kapal tersebut secara fisik masih terawat dengan baik dan laik laut. Namun demikian, Tim Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : meminta Pemerintah Jepang untuk memastikan kapal benar-benar dalam kondisi laik operasi pada saat proses hibah, meminta manual book kapal dan mesin disiapkan dalam berbahasa Inggris dan meminta mesin diesel yang terpasang di kapal dapat bekerja dengan bahan bakar bio diesel sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia.

SINERGITAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI BERSAMA

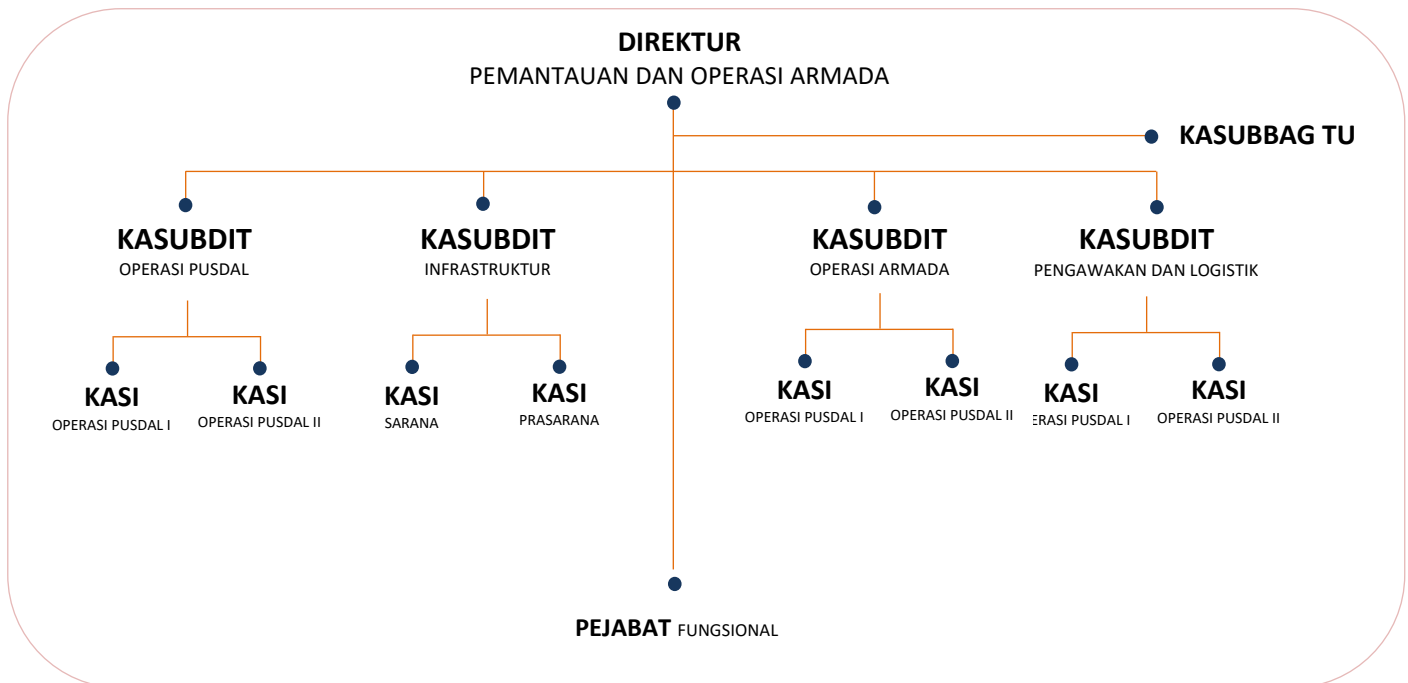
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan tersendiri bila sinergi. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia mengharuskan operasi Bersama dan terkoordinasi dar antar Lembaga penegak hukum di laut.

Berkaca dari permasalahan Natuna, sebagian pihak menganggap bahwa hal itu terjadi karena sering kosongnya perairan Natuna dari pengawasan. Bila hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal PSDKP, tentulah berat mengingat masih terbatasnya armada kapal pengawas perikanan yang dimiliki.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2019 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2015-2019 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2020.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2020 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2020.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2020-2024. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).

- d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa output kegiatan sebagai berikut:

- 1. Operasional Kapal Pengawas;
- 2. Operasional Pesawat Patroli;
- 3. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi;
- 4. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi;
- 5. Supervisi Operasional Speedboat;
- 6. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi;
- 7. Kapal Pengawas yang Dibangun;
- 8. Speedboat Pengawas yang Dibangun;
- 9. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 10. Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun;

11. Layanan Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2020

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2020 terdiri atas 9 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	70
2.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	51
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	53.35
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	4
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	80
3.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (Unit)	2
		8	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun (Unit)	11
		9	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun (Unit)	18
		10	Jumlah amada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	120
4.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	11	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	86.72
		12	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	86.72
		13	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	150
		14	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	50
		15	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	150
		16	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	100
5.	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	17	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	72
		18	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75
		19	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	80
6.	Terselenggaranya penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP	20	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	7
7.	Terselenggaranya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	82

No	SASARAN KEGIATAN	No	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2020
8.	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	22	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Direktorat POA (%)	100
		23	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60
		24	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Direktorat POA (%)	100
		25	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Direktorat POA (%)	100
		26	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi <i>Transmitter</i> (Indeks)	80
		27	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA (Inovasi)	1
9.	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	28	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	88
		29	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat POA dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat POA tahun sebelumnya (%)	1

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2020 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Operasional Kapal Pengawas	159.965.709.000
2	Operasional Pesawat Patroli	31.500.000.000
3	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	10.395.000.000
4	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	48.986.792.000
5	Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	11.102.500.000
6	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	309.311.000
7	Kapal Pengawas yang Dibangun	3.272.280.000
8	Speedboat Pengawas yang dibangun	1.355.900.000
9	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1.989.585.000
10	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	1.000.000.000
11	Layanan Perkantoran	257.760.000
Anggaran Direktorat POA 2020		270.134.837.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I 2020

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA triwulan I 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 98.51% dengan indikator NPSS berwarna HIJAU. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Dari tabel perbandingan di atas terlihat kenaikan capaian perspektif *internal process* dan *learning and growth*. *Summary* dari capaian tiap perspektif ditampilkan pada infografis berikut ini:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan I 2020

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90	-	-
	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	70	-	-
Terselenggaranya Pemantauan SDKP	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	51	17,78	34.86%
	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	53.35	17,51	32.82%
	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	4	0,49	12.25%
	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	80	-	-
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	Jumlah kapal pengawas yang dibangun (Unit)	2	-	-
	Jumlah speedboat pengawas yang dibangun (Unit)	11	-	-
	Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun (Unit)	18	-	-
	Jumlah amada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	120	-	-
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	86.72	-	-
	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	86.72	-	-
	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	150	29	19.33%
	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	50	4	8.00%
	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	150	28	18.67%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	100	-	-
Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	72	-	-
	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75	80	106.67%
	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	80	-	-
Terselenggaranya penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	7	-	-
Terselenggaranya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	82	85	103.66%
Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	27.90	46.50%
	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Direktorat POA (%)	100	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (Indeks)	80	-	-
	Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA (Inovasi)	1	-	-
Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	88	79.24	90.05%
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat POA dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat POA tahun sebelumnya (%)	1	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas, dan (2) Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%).

1

TINGKAT KEAKTIFAN PROVINSI DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaanya. Salah satu tools yang digunakan adalah “form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap Provinsi terkait.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	-	-	-

Pada tahun 2020, capaian IKU “Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas ” ditargetkan sebesar **90,00%**. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode triwulan I 2020 sebesar 0% dengan realisasi sebesar **0%**. Berdasarkan rincian target kinerja 2020, pengukuran dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

2

PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI POKMASWAS

Indikator kinerja “Persentase Tindak lanjut Informasi POKMASWAS IKU ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut informasi POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Informasi yang disajikan dapat berupa :

1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;

2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:

1. Pelaksanaan patroli;
2. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan, dan lain-lain).

Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS	-	-	-

Hingga triwulan I 2020 untuk Indikator Kinerja “Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS” belum ada capaian, berdasarkan rincian target kinerja, akan dilaksanakan pada periode triwulan II 2020.

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Pemantauan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli, (3) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dan Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP.

3

PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada kapal pengawas (matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang diawasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Target dan realisasi IKU-3 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET	REALISASI TWI 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	11.87	9	17.78	100.00

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” periode triwulan I 2020 adalah sebesar **17.78%** dari target sebesar **9.00%** dengan persentase capaian sebesar **100%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **342,816 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi cakupan diberikan oleh 28 unit armada kapal pengawas perikanan sebagai berikut:

Tabel 8. Daftar armada kapal pengawas Ditjen PSDKP Tahun 2020

No	Nama Kapal	No	Nama Kapal	No	Nama Kapal
1	KP Orca 01	13	KP Hiu Macan 06	25	KP Hiu 12
2	KP Orca 02	14	KP Hiu 01	26	KP Hiu 13
3	KP Orca 03	15	KP Hiu 02	27	KP Hiu 14
4	KP Orca 04	16	KP Hiu 03	28	KP Hiu 15
5	KP Hiu Macan Tutul 01	17	KP Hiu 04		
6	KP Hiu Macan Tutul 02	18	KP Hiu 05		
7	KP Paus 01	19	KP Hiu 06		
8	KP Akar Bahar 01	20	KP Hiu 07		
9	KP Hiu Macan 01	21	KP Hiu 08		
10	KP Hiu Macan 03	22	KP Hiu 09		
11	KP Hiu Macan 04	23	KP Hiu 10		
12	KP Hiu Macan 05	24	KP Hiu 11		

4

PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU PESAWAT PATROLI

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan Pesawat Patroli” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada pesawat patrol udara (matra udara). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan pesawat patrol udara ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU-4 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli	10,39	12	17,51	145,92%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli udara” periode triwulan I 2020 adalah sebesar **17.51%** dari target sebesar **12.00%** dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar **145%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **337643,2 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Selama periode operasi triwulan 2020 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode operasi dengan lokasi pangkalan operasi antara lain: Natuna, Manado Ternate, Jakarta, Sorong, Biak dan Merauke. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh total jam operasi sebanyak 118,31 jam dan 28 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain : "Beechcraft King Air B200GT Beechcraft Hawker 900XP", Beechcraft King Air B200GT, Seneca IV PA-34-220T, Beechcraft King Air B200GT.

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut, antara lain :

1. Periode I: ORCA 01, ORCA 02, ORCA 03, HMT 02
2. Periode II: KP. Hiu Macan Tutul 01, KP. Hiu 02, KP. Hiu 14, KP. Hiu 15
3. Periode III.A: Unsur Laut dari PSDKP Jakarta;
4. Periode III: ORCA 01, ORCA 04, HIU 14;

Tabel 10. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli periode I 2020

Periode	Fokus Operasi	Tindak Lanjut
I	Pemantauan Kapal Ikan Asing di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara.	"1. Penerusan data dan informasi kepada Kapal Pengawas yang terintegrasi dengan Operasi Air Surveillance Periode I Natuna; 2. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya."
II	"• Pemantauan Kapal Ikan Asing Perbatasan RI – Filipina; • Tindak lanjut pengaduan Pemda Prov. Maluku di Laut Halmahera dan Laut Seram; • Identifikasi pemasangan FAD baru di WPPNRI 715 dan WPPNRI 716;	"1. Penerusan data dan informasi kepada Kapal Pengawas KP Hiu 15, KP Hiu 14 , dan KP. Hiu 02 yang terintegrasi dengan Operasi Air Surveillance Periode II; 2. Validasi ketaatan terhadap SPKP terhadap 1 Kapal Pengangkut >30 GT dengan nama/nomor lambung KM.

Periode	Fokus Operasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Destructive Fishing di Teluk Bone, Selayar dan Kepulauan Sailus; • Validasi kepatuhan SPKP di seluruh wilayah pemantauan." 	<p>Sentosa XXIV, 1 Kapal Purse Seine >30 GT dengan nama/nomor lambung KM. Kemilau, dan 1 Kapal Gillnet >30 GT dengan nama/nomor lambung KM. Charly Tuna Wijaya – 12 dengan status Aktif;</p> <p>3. Pengumpulan data dan pemetaan terhadap sebaran kapal perikanan dan alat bantu penangkap ikan (rumpon) yang terdapat di WPPNRI 716 Laut Sulawesi; WPPNRI 715 Laut Maluku, Teluk Tomini, dan Laut Halmahera; WPPNRI 713 Teluk Bone dan Laut Flores;</p> <p>4. Pemantauan Kapal Ikan Asing terpantau 4 (empat) pump boat terindikasi asal Filipina;</p> <p>5. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya."</p>
III.A	Pemantauan Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI 712 Laut Jawa tepatnya di pesisir timur Provinsi Lampung.	<p>"1. Penerusan data dan informasi kepada Kapal Pengawas yang terintegrasi dengan Operasi Air Surveillance Periode II-A yakni Pangkalan PSDKP Jakarta;</p> <p>2. Pengumpulan data dan pemetaan terhadap sebaran kapal perikanan dan alat bantu penangkap ikan (rumpon) yang terdapat di WPPNRI 712 Perairan Lampung Timur;</p> <p>3. Pembaharuan data indikasi pelanggaran dan indeks kerawanan untuk bahan operasi berikutnya."</p>
III	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan KKPN TWP Padaido; • Pemantauan KKPN TN Cendrawasih; • Pemantauan Kawasan Konservasi Waigeo; • Pemantauan aktivitas Kapal Ikan Asing di WPPNRI 717 dan 718; • Pemantauan aktivitas Kapal Ikan Indonesia di WPPNRI <30GT di WPPNRI 712, 716, 717 dan 718; 	-

Periode	Fokus Operasi	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> Validasi Kepatuhan Kapal Ikan Indonesia >30 GT terhadap SPKP." 	

5

PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan Speedboat Pengawas” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada speedboat pengawas (bagian dari matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang diawasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI menggunakan armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang dimiliki oleh UPT Ditjen PSDKP maupun Satker DKP Provinsi.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,66	0,40	0,49	122,50%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” periode triwulan I 2020 adalah sebesar **0,49%** dari target sebesar **0.40%** dengan persentase capaian sebesar **122%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **9382 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tercatat pada database Direktorat POA sebanyak 127 unit.
2. Dari jumlah armada tersebut, sebanyak 60 unit Speedboat terpantau belum melaksanakan operasi, hal tersebut diperoleh informasi dari laporan yang masuk, dimana jumlah laporan hasil operasi triwulan I 2020 hanya 67 unit speedboat. Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Direktorat POA, bahwa sebagian speedboat dalam proses perbaikan, dan Sebagian yang lain akan beroperasi pada triwulan II, karena pada Satker DKP Provinsi selain dana Tugas Pembantuan (TP) Direktorat POA juga menggunakan dukungan APBD.
3. Total jam operasi sejumlah **2345,5** jam dengan capaian jumlah hari sebanyak 4 hari.

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode triwulan I 2020 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	-	80	91.66	114,58%

Indikator ini merupakan Indikator baru untuk tahun 2020, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian melampaui target yang ditetapkan, target untuk triwulan I 2020 sebesar 80% dengan capaian 91.66 dengan persentase capaian sebesar 114.58%. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa melakukan pemenuhan kebutuhan data dan analisis hasil pemantauan yang digunakan untuk kebutuhan operasi pengawasan SDKP.

Pemenuhan analisis data pada periode triwulan I 2020 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Kebutuhan Operasi Kapal Pengawas, Kebutuhan Operasi Pesawat Patroli, Analisis Pergerakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Pemantauan Kapal Perikanan di 10 (sepuluh) Wilayah Konservasi Nasional.

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Jumlah kapal pengawas yang dibangun (2) Jumlah speedboat pengawas yang dibangun, (3) Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, (4) Jumlah armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi.

7

JUMLAH KAPAL PENGAWAS YANG DIBANGUN

Indikator Kinerja “Jumlah Kapal Pengawas yang Dibangun” IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah armada Kapal Pengawas yang berhasil dibangun pada tahun 2020. Kegiatan pengadaan Kapal Pengawas 2020 dilaksanakan oleh UPT PSDKP. Tahun 2020 Direktorat POA menargetkan pembangunan Kapal Pengawas sebanyak 2 (dua). Dengan rincian sebagai berikut:

- Pangkalan PSDKP Batam 1 unit
- Stasiun PSDKP Belawan 1 unit

Hingga triwulan I 2020 progres pembangunan Kapal Pengawas sudah 6.90% dari target 6.03%. Dengan demikian realisasi / capaian IKU 7 belum ada capaian, realisasi capaian direncanakan pada triwulan IV 2020. Tabulasi target dan realisasi IKU sebagai berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-7 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Speedboat Pengawas yang Dibangun	-	-	-	-

8

JUMLAH SPEEDBOAT PENGAWAS YANG DIBANGUN

Indikator Kinerja “Jumlah Speedboat Pengawas yang Dibangun” IKU ini dimaksudkan untuk mengukur jumlah armada Speedboat Pengawas yang berhasil dibangun pada tahun 2020. Kegiatan pengadaan Speedboat Pengawas 2020 dilaksanakan oleh UPT PSDKP. Tahun 2020 Direktorat POA menargetkan pembangunan untuk 11 (sebelas) unit Kapal Pengawas Kelas F/Speedboat (Speedboat dan RIB) Pengawas. Dengan rincian 5 (lima) unit speedboat dan 6 (enam) unit RIB sebagai berikut:

Speedboat

- Pangkalan PSDKP Jakarta 1 unit
- Pangkalan PSDKP Bena 1 unit

- Stasiun PSDKP Cialacap 1 unit
- Stasiun PSDKP Pontianak 1 unit
- Stasiun PSDKP Tarakan 1 unit

Rigid Inflatable Boat (RIB)

- Pangkalan PSDKP Batam 1 unit
- Pangkalan PSDKp Jakarta 1 unit
- Pangkalan PSDKP Bena 1 unit
- Stasiun PSDKP Kupang 1 unit
- Stasiun PSDKP Tahuna 1 unit
- Stasiun PSDKP Ambon 1 unit

Hingga triwulan I 2020 progres pembangunan *Speedboat* panjang 16 meter dan Pengawas sudah pada tahap Proses tender (Pengumuman Pascakualifikasi dan download dokumen pemilihan) sementara progress pembangunan speedboat panjang 8.5 meter sudah pada tahap penyusunan dokumen tender.

Dengan demikian realisasi / capaian IKU 7 belum ada capaian, realisasi capaian direncanakan pada triwulan IV 2020. Tabulasi target dan realisasi IKU sebagai berikut:

Tabel 14. Target dan Realisasi IKU-8 Periode Triwulan I 2020

NDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Speedboat Pengawas yang Dibangun	-	-	-	-

9

JUMLAH BANGUNAN/POS PENGAWASAN YANG DIBANGUN

Indikator Kinerja “Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang Dibangun” dimaksudkan untuk mengukur jumlah prasarana pengawasan SDKP yang berhasil dibangun di UPT Ditjen PSDKP pada tahun anggaran 2020. Target pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 18 (delapan belas) unit. Progres pembangunan prasarana pengawasan SDKP sampai dengan triwulan I 2020 ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 15. Progress pembangunan prasarana pengawasan

No	Prasarana	Pelaksana	Nama Kegiatan	Keterangan	
A	Kantor Pengawas/ Bangunan Fungsional	1	Stasiun PSDKP Belawan	Pembangunan Bangunan Fungsional Satwas SDKP Langsa	Proses penyusunan DED

No	Prasarana	Pelaksana	Nama Kegiatan	Keterangan	
		2	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pembangunan Bangunan Fungsional Wilker SDKP Pangandaran	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		3	Pangkalan PSDKP Tual	Pembangunan Bangunan Fungsional Satwas SDKP Merauke	Penyusunan KAK perencanaan
		4	Stasiun PSDKP Biak	Pembangunan Bangunan Fungsional Satwas Manokwari	Penyusunan KAK perencanaan
		5	Stasiun PSDKP Biak	Pembangunan Bangunan Fungsional Satwas SDKP Jayapura	Penyusunan KAK perencanaan
B	Bangunan Operator	1	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pembangunan Bangunan Operator Wilker SDKP Pangandaran	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		2	Stasiun PSDKP Ambon	Pembangunan Bangunan Operator Stasiun PSDKP Ambon	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		3	Stasiun PSDKP Biak	Pembangunan Bangunan Operator Satwas SDKP Jayapura	Penyusunan KAK perencanaan
		4	Stasiun PSDKP Biak	Pembangunan Bangunan Operator Satwas SDKP Manokwari	Penyusunan KAK perencanaan
C	Gudang	1	Pangkalan PSDKP Lampulo	Pembangunan Gudang Pangkalan PSDKP Lampulo	Proses penyusunan DED
		2	Pangkalan PSDKP Jakarta	Pembangunan Gudang Satwas SDKP Pandeglang	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		3	Stasiun PSDKP Pontianak	Pembangunan Gudang Logistik KP Stasiun PSDKP Pontianak	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		4	Stasiun PSDKP Pontianak	Pembangunan Gudang Satwas SDKP Kota Waringin Barat	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		5	Stasiun PSDKP Kupang	Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Kupang	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
		6	Stasiun PSDKP Ambon	Pembangunan Gudang Stasiun PSDKP Ambon	Persiapan Tender Fisik/Konstruksi
D	Penampungan Sementara ABK Non Yustisia	1	Stasiun PSDKP Tarakan	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara ABK TPKP	Persiapan Tender Konstruksi/Fisik
E	Bangunan Serbaguna	1	Stasiun PSDKP Tarakan	Pembangunan Bangunan Serbaguna Stasiun PSDKP Tarakan	Persiapan Tender Konstruksi/Fisik
		2	Pangkalan PSDKP Tual	Pembangunan Bangunan Serbaguna Pangkalan PSDKP Tual	Penyusunan KAK perencanaan

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa perkembangan pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 18 (delapan belas) unit adalah 6 (enam) kegiatan yang masih dalam proses penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) perencanaan, 2 (dua) kegiatan dalam penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) dan 10 (sepuluh) kegiatan dalam persiapan tender konstruksi/fisik.

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada selaku pengendali teknis telah melaksanakan kegiatan supervisi dan pengendalian pembangunan prasarana pengawasan SDKP melalui rapat, korespondensi persuratan maupun kunjungan langsung ke UPT lingkup Ditjen PSDKP.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-9 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang Dibangun	-	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa belum ada realisasi/capaian untuk IKU 9, realisasi diproyeksikan pada periode triwulan IV 2020.

10

JUMLAH ARMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SIAP OPERASI

Jumlah armada kapal pengawas perikanan Ditjen. PSDKP triwulan I 2020 sebanyak 120 unit yang terdiri dari 28 unit kapal pengawas dan 92 unit *speedboat* pengawas. Tolok ukur kinerja armada pengawasan ditetapkan melalui IKU “jumlah armada pengawasan siap operasi” sebanyak 34 unit.

kondisi kapal pengawas siap operasi, dilakukan upaya pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan rutin bulanan, perawatan tahunan (*docking*), perbaikan darurat/mendesak, dan memastikan ketersediaan suku cadang (*spare part*) dan perlengkapan kapal pengawas.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi	-	-	-	-

Berdasarkan rincian target kinerja, pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada triwulan IV 2020.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (2) Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (3) Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas, (4) Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (5) Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli, (6) Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

11

INDEKS KINERJA OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga triwulan I 2020 untuk IKU ini belum ada realisasi, pengukuran akan dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga triwulan I 2020 untuk IKU ini belum ada realisasi, pengukuran akan dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh kapal pengawas perikanan Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian hari operasi merupakan salah satu tolok ukur dari capaian kinerja Direktorat POA yang sangat dominan. Hal ini karena sebagian besar komponen anggaran pada Direktorat POA diperuntukkan bagi tersedianya logistik kapal pengawas/Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tanpa BBM tentunya Kapal Pengawas Perikanan tidak bisa melaksanakan operasi pengawasan. Besar kecilnya hari operasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan di laut. Semakin banyak alokasi anggaran semakin memberikan kesempatan kepada armada kapal pengawas untuk siap melaksanakan operasi pengawasan SDKP.

Target hari operasi Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP untuk tahun 2020 sebesar 150 hari operasi dan 25 hari target selama periode triwulan I 2020 (target untuk 28 unit Kapal Pengawas). Target hari operasi tersebut bersifat rata-rata, sehingga target untuk masing-masing kapal tidaklah sama. Hingga akhir triwulan I 2020, realisasi rata-rata hari operasi Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP telah tercapai sebesar 29 hari operasi dengan rata-rata jam layar sebesar 9.85 jam per hari. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 capaian triwulan I 2020 terlihat lebih tinggi.

Capaian tersebut telah melampaui target yaitu 25 hari. Besarnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Perencanaan operasi yang baik sehingga pelaksanaan menjadi lebih terarah;
- Sebagian besar armada kapal pengawas dalam kondisi siap operasi setelah pada akhir tahun 2019 menjalani perbaikan/perawatan maupun *docking*.

Tabel 20. Target dan Realisasi IKU-13 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas	15	25 hari	29 hari	116,00

Tabel 21. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2015-2020

TAHUN	TARGET HARI OPERASI	CAPAIAN HARI OPERASI	%
2014	66	73	110.61
2015	280	270	96.43
2016	144	138	95.83
2017	136	131	96.32
2018	145	122	84.14
2019	84	88	103.53
2020*	150	29	19,33

*Data sampai dengan triwulan I 2020

14

JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh speedboat pengawas Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat POA selaku Pembina teknis di bidang pengoperasian Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup pusat dan UPT senantiasa melakukan kontrol terhadap capaian

operasi Kapal Pengawas maupun *Speedboat* Pengawas. Selain melakukan fungsi kontrol dan konsultasi, Direktorat POA juga melakukan supervisi ke lapangan untuk melihat dan memastikan operasi sesuai dengan jadwal serta mengetahui lebih dekat kendala-kendala teknis yang terjadi. Akan tetapi sampai dengan periode triwulan I 2020 belum dilakukan supervisi ke lapangan, dikarenakan adanya pandemic Virus Covid-19, sehingga fungsi kontrol dilakukan secara online melalui sarana Watshapp, Zoom Meeting dan metode lainnya.

Tabel 22. Target dan Realisasi IKU-14 Periode Triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	3 hari	4 hari	133.33

Berdasarkan data pada tabel 22 terlihat bahwa capaian hari operasi *speedboat* melampaui target pada triwulan I 2020. Realisasi ini sejalan dengan rencana operasi yang telah disusun, sehingga diharapkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dapat berjalan sesuai rencana.

Rekapitulasi laporan yang masuk ke Direktorat POA Cq. Subdit Operasi Armada, diperoleh data realisasi rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas periode triwulan I 2020 sebanyak 4 hari dengan rata jam operasi per hari sebanyak 5,2 jam. Rata-rata tersebut diperoleh dari Satker UPT PSDKP dan DKP Provinsi. Dari operasi yang dilakukan selama triwulan I 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 23. Hasil Operasi Speedboat Periode Triwulan I 2020

	KII	KIA	JUMLAH
RIKSA	535	0	535
TANGKAP	15	0	15

Tabel 24. Capaian hari operasi speedboat pengawas 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30	31	103.33
2020	50	4*	8.00

Capaian s/d triwulan I 2020

15

JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI PESAWAT PATROLI

Indikator Kinerja “Jumlah hari operasi pesawat patrol” bertujuan untuk mengukur realisasi hari operasi pengawsan SDKP yang dilakukan dari matra udara. Target hari operasi pesawat patroli udara untuk tahun 2020 sebesar 150 hari operasi. Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan

secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP, serta kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 25. Target dan realisasi IKU-15 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Pesawat Patroli	19	25 hari	28 hari	112.00

Hingga triwulan I 2020, capaian IKU “Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU *fishing* dan merusak SDKP di WPPNRI” sebesar 28 hari dari target 25 Hari. Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui udara (*Airborne Surveillance*) periode triwulan I 2020 telah dilaksanakan sebanyak 3 periode, dengan 118,31 jam operasi, 4 pangkalan operasi dan mencakup *coverage area* sejumlah 337643,2 NM². Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP.

Berdasarkan capaian sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa realisasi hari operasi telah berjalan sesuai dengan rincian target kinerja bahkan melampaui target. Rincian pelaksanaan hari operasi pesawat patroli ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian pelaksanaan operasi udara sd Maret 2020

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	1 dan 7-9 Januari 2020	4	Natuna	WPPNRI 711	46.732,8	KP ORCA 01, KP ORCA 02, KP HMT 02	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA asal Vietnam
II-A	10 Februari 2020	1	Jakarta	WPPNRI 712	3.523,2	-	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi ke Kapal Pengawas Jakarta
II	12 – 28 Februari 2020	13	Manado dan Ternate	WPPNRI 716, 715, 713	158.592	KP Hiu Macan Tutul 01	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas Pumpboat KIA Filipina • Penerusan informasi ke KP terintegrasi
III	16 – 26 Maret 2020	10	Merauke, Biak, Sorong	WPPNRI 716, 717, 718	128.795,2	KP Hiu 05, KP HIU 14	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan KKPN TWP Padaido, TN Cendrawasih, Waigeo; • Pemantauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PMA • Pemantauan aktivitas KIA dan KII

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
Total Hari Operasi		28	Total Coverage Area (NM ²)		337.643,2		

Beberapa visual hasil pemantauan melalui matra udara periode triwulan I 2020 sebagai berikut:



Gambar 2. Kapal Squid Jigging di WPPNRI 718



Gambar 3. Kapal Squid Jigging di WPPNRI 718



Gambar 4. Pemantauan Pulau Semau (PMA)



Gambar 5. Pemantauan Pesisir Pulau Mangudu (PMA)

Kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan kegiatan pengawasan. Untuk memantau Kesehatan AKP setiap tahun dilakukan medical check up oleh rumah sakit Angkatan Laut/atau rumah sakit pemerintah lainnya yang ditunjuk/memiliki Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan/medical check up, telah disusun IKU “Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan” dengan tujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

Tabel 27. Rincian target dan realisasi IKU-16 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan	-	0	0	0

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2020, sehingga tidak dapat dilakukan analisis dan komparasi data capaian dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Terlihat pula data capaian untuk periode triwulan I 2020 belum ada capaian, pengukuran IKU ini berdasarkan rincian target kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, dimulai pada periode triwulan II 2020 dengan target sebesar 100%.

SASARAN KEGIATAN 5

Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, dan (2) Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA.

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : ¹⁾ Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin, dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatpim+Diklat20 oj+Seminar)/3)
+ (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Fungsional :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat20 oj+
Seminar)/3) + (Nilai Skp) + (Nilai Disiplin)
- ASN Staf :
(Nilai Kualifikasi) + (Kompetensi(Diklat20 oj+ Seminar)/3) + (Nilai
Skp) + (Nilai Disiplin)

Hingga triwulan I 2020 capaian IKU ini masih 0%, pengukuran akan dilakukan pada triwulan IV 2020

18

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2020 antara lain :

1. BIMTEK Manajemen Proyek, Subdit Infrastruktur ;
2. BIMTEK Perawatan Kapal Pengawas (ISM Code, Risk Assessment Training, SIRIKA, Pengecatan Kapal Pengawas, dan Pengelasan), Subdit Operasi Armada;
3. BIMTEK Aplikasi SKAT Online, Subdit Operasi PUSDAL.

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-18 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Tingkat pemahaman peserta BIMTEK lingkup Direktorat POA	-	75	80	106.67

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 yang tidak ada di tahun sebelumnya/2019. Berdasarkan tabel 28 terlihat bahwa realisasi untuk periode triwulan I tahun 2020 sebesar 80% dari target 75% dengan capaian 106.67%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa realisasi untuk periode triwulan I 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target yang diberikan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Tingkat Kelulusan dari Peserta Diklat Teknis Lingkup Direktorat POA diperoleh dari perhitungan hasil kelulusan keseluruhan peserta yang mengikuti Diklat. Diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat POA tahun 2020 antara lain : GMDSS, AFF, MFA, SCRB, dan SSO.

Sampai dengan triwulan I 2020 capaian masih 0%, pengukuran direncanakan dilakukan mulai triwulan II 2020.

SASARAN KEGIATAN 6

Terselenggaranya penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA.

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA tahun 2020 berjumlah 7 rancangan antara lain:

1. Petunjuk teknis Perawatan Tahunan (Docking) Kapal Pengawas Perikanan;
2. Petunjuk teknis Penyiapan Suku Cadang Kapal Pengawas Perikanan
3. Petunjuk teknis pembinaan pokmaswas;
4. Petunjuk teknis pendaftaran SKAT Online;
5. Petunjuk teknis sanksi administrasi
6. Petunjuk teknis Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP
7. Petunjuk teknis Pembinaan Awak Kapal Pengawas

Sampai dengan triwulan I 2020 capaian masih 0%, progress masih dalam tahap penyiapan draft bahan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

SASARAN KEGIATAN 7

Terselenggaranya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

Pencapaian Sasaran Kegiatan 7 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA.

21

PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

a. Keikutsertaan

Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV

b. Dokumen

Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain : Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja.

c. Keaktifan

Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa)*, *What (Apa yang terjadi)*, *Where (dimana peristiwa terjadi)*, *When (kapan peristiwa terjadi)*, *Why (mengapa hal itu terjadi)*, dan *How (bagaimana hal itu terjadi)*.

Tabel 29. Target dan realisasi IK-21 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	57.50%	65%	85%	130,77%

Berdasarkan tabel 29 terlihat target untuk triwulan I 2020 sebesar 65% dengan capaian sebesar 86%, hal ini mengindikasikan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan, bahkan lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2020. Tingginya capaian tersebut karena terjadi peningkatan keaktifan dan keikutsertaan lingkup Direktorat POA pada aplikasi manajemen pengetahuan.

SASARAN KEGIATAN 8

Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Direktorat POA, (2) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, (3) Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Direktorat POA, (4) Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Direktorat POA, (5) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, dan (6) Jumlah inovasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA.

22

PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN RB LINGKUP DIREKTORAT POA

Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek:

- (a) kelembagaan atau organisasi;
- (b) ketatalaksanaan atau *business process*; dan
- (c) sumber daya manusia aparatur.

Pemenuhan Dokumen Reformasi Birokrasi lingkup Sekretariat Ditjen. PSDKP merupakan kompilasi dari seluruh dokumen RB Ditjen. PSDKP pada 8 area perubahan, yaitu

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Peraturan Peundang-undangan;
3. Penataan dan Penguatan Organisasi;

4. Penataan Tata Laksana;
5. Penataan Sistem Manajemen SDM;
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Penguatan Pengawasan;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan triwulan I 2020 capaian masaih 0%, berdasarkan rincian target kinerja pengukuran akan dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

23

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2019 s.d. 30 September 2020 atau Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Pada tahun 2020 Direktorat POA memiliki 15 rekomendasi yang harus dituntaskan tindalanjutnya pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut sampai dengan triwulan I 2020 Direktorat POA telah menindaklanjuti hasil pengawasan sebanyak..

Tabel 30. Target dan realisasai IK-23 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	-	15	27	186.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan I 2020 mencapai 27 tindaklanjut dari target 15 tindaklanjut. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat POA sangat fokus dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP, dalam rangka proses perbaikan dan akuntabilitas kinerja.

Metode pengukuran Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Direktorat POA dilakukan dengan menghitung persentase dokumen SPIP lingkup Direktorat POA yang dipenuhi. Dokumen SPIP dimaksud berupa rancangan atau draft.

Hingga triwulan I 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, direncanakan pengukuran akan dilakukan pada triwulan IV 2020.

SAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hingga triwulan I 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran direncanakan pada triwulan IV 2020.

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter). Untuk mengukur hal tersebut dilakukan dengan metode survey. Survey dilakukan selama 2 (dua) kali yaitu pada semester I dan Semester II Tahun 2020.

Hingga triwulan I 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran direncanakan pada triwulan IV 2020.

Tujuan utama dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah melakukan perbaikan tata kelola birokrasi secara terus-menerus (*improved bureaucracy*) pada delapan area perubahan, yaitu: Organisasi, Peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Pelayanan Publik, Tata Laksana, Akuntabilitas serta Pola Pikir dan Budaya Kerja;

Perubahan yang diharapkan pada 8 (delapan) Area Perubahan tersebut adalah perubahan yang partisipatif dengan cara mendorong peran serta pegawai dalam seluruh proses perubahan untuk mencari, menemukan dan menerapkan konsep dan mekanisme/metode baru (inovasi), yang memberikan daya ungkit (*leverage*) bagi perubahan/transformasi yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun pegawainya;

Penciptaan Inovasi yang dilakukan pada lingkup Ditjen. PSDKP menggunakan pendekatan *Total Quality Management* (TQM) dengan menerapkan 8 langkah dan 7 alat melalui Gugus Kendali Mutu (kelompok) dan Sistem Sumbang Saran (individu).

Hingga triwulan I 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran dilaksanakan pada periode triwulan IV 2020.

SASARAN KEGIATAN 9

Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

Pencapaian Sasaran Kegiatan 8 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu: (1) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA, dan (2) Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat POA dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat POA tahun sebelumnya.

28

NILAI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN LINGKUP DIREKTORAT POA

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

Penilaian atas kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa Indikator Pelaksanaan Anggaran antara lain : Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan. Perhitungan ini diperoleh dari data OM SPAN Kemenkeu dirilis secara otomatis setiap bulan. Berdasarkan perhitungan untuk target dan realisasi indikator kinerja ini ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 31. Target dan realisasi IK-28 periode triwulan I 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA	88.00	87	79.24	91.08

Sampai dengan triwulan I 2020 nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat POA tercapai sebesar 79.24% dari target 87% atau persentase capaian sebesar 91.08%. Dari data tersebut terlihat untuk indikator kinerja ini pada triwulan I 2020 belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Adanya revisi halaman III DIPA Satker Direktorat POA;
- Adanya ketidakpatuhan data kontrak terhadap regulasi;
- Rendahnya penyerapan anggaran; dan
- Performa penyelesaian tagihan.

Rincian NKPA Direktorat POA periode triwulan I 2020 sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT KAPAL PENGAWAS																				
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																				
Sampai Dengan : MARET																				
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM		Nilai Total	Konversi Bobot
1	175	449551	DIREKTORAT PEMANTALAN DAN OPERASI ARMADA	Nilai	100.00	19.36	100.00	70.00	100.00	100.00	0.00	81.47	75.00	0	100.00	100.00	70.69	85%	N/A	
				Bobot	5	5	5	15	8	5	0	15	12	0	5	5				5
				Nilai Akhir	5.00	0.97	5.00	10.50	8.00	5.00	0.00	12.22	9.00	0	5.00	5.00				5.00
				Nilai Aspek	73.12			67.50				64.12				100.00				

Disclaimer:
 1) Sehubungan dengan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-288/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020, maka penilaian IKPA untuk level Satker, Eselon I, K/L, KPPN, dan Kanwil tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan.
 2) Nilai per indikator yang masih muncul pada halaman ini dapat digunakan untuk keperluan manajerial, namun tidak digunakan sebagai basis penilaian kinerja.

Gambar 6. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2020

29

BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DIREKTORAT POA DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT POA TAHUN SEBELUMNYA

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPSDKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Hingga triwulan I 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran dilaksanakan pada periode triwulan IV 2020.

REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA

Realisasi anggaran Direktorat POA triwulan I 2020 adalah sebesar **Rp23.995.645.513** atau **8.88%** dari pagu **Rp270.134.837.000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lebih rendah, realisasi triwulan I 2019 sebesar 28.108.210.166, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan karena menunggu pengesahan beberapa kali proses revisi DIPA Satker Direktorat POA.

Tabel 32. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 31 Maret 2020

OUTPUT KEGIATAN	TOTAL PAGU BELANJA	TOTAL REALISASI BELANJA (Rp)	SISA PAGU BELANJA (Rp)	%
OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS	159.965.709.000	17.810.070.158	142.155.638.842	11,13%
OPERASIONAL PESAWAT PATROLI	31.500.000.000	881.259.392	30.618.740.608	2,80%
AWAK KAPAL PENGAWAS YANG MUMPUNI DAN MEMENUHI KUALIFIKASI	10.395.000.000	2.110.561.894	8.284.438.106	20,30%
ARMADA DAN SISTEM SIAP OPERASI	48.986.792.000	1.785.989.271	47.200.802.729	3,65%
PERANGKAT SISTEM YANG OPERASIONAL DAN TERINTEGRASI	11.102.500.000	713.016.110	10.389.483.890	6,42%
OPERASIONAL SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT	309.311.000	0	309.311.000	0,00%
KAPAL PENGAWAS YANG DIBANGUN	3.272.280.000	337.695.700	2.934.584.300	10,32%
SPEEDBOAT PENGAWAS YANG DIBANGUN	1.355.900.000	46.388.000	1.309.512.000	3,42%
POKMASWAS YANG AKTIF MEMBANTU PENGAWASAN SDKP	1.989.585.000	182.564.507	1.807.020.493	9,18%
BANGUNAN/POS PENGAWASN SDKP YANG DIBANGUN	1.000.000.000	90.430.481	909.569.519	9,04%
LAYANAN PERKANTORAN	257.760.000	37.670.000	220.090.000	14,61%
TOTAL	270.134.837.000	23.995.645.513	246.139.191.487	

Tabel 33. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA 2018-2020

OUTPUT KEGIATAN	Anggaran 2018		Anggaran 2019		Anggaran 2020	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Operasional Kapal Pengawas	167,033,431,000	111,340,712,829	76,049,753,000	73,604,092,876	159.965.709.000	17.810.070.158
Operasional Pesawat Patroli	22,500,000,000	21,451,370,262	14,448,000,000	14,083,758,779	31.500.000.000	881.259.392
Awak Kapal Pengawas Yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	1,000,000,000	749,919,566	13,074,947,000	11,984,713,317	10.395.000.000	2.110.561.894
Armada dan Sistem Siap Operasi	15,887,400,000	15,474,158,012	28,046,705,000	23,463,912,637	48.986.792.000	1.785.989.271
Perangkat Sistem Yang Operasional dan Terintegrasi	10,372,670,000	1,812,820,013	4,324,125,000	3,951,217,093	11.102.500.000	713.016.110
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	-	-	309.311.000	0
Kapal Pengawas yang Dibangun	18,000,000,000	-	-	-	3.272.280.000	337.695.700
Speedboat Pengawas yang Dibangun	5,000,000,000	-	-	-	1.355.900.000	46.388.000
Unit Usaha yang Dipantau	500,000,000	332,817,503	-	-	-	-
POKMASWAS Yang Aktif Membantu Pengawasan SDKP	423,430,000	365,789,418	481,924,000	390,236,615	1.989.585.000	182.564.507
Bangunan/Pos Pengawasan Sdkp Yang Dibangun	350,000,000	173,106,462	400,000,000	377,669,118	1.000.000.000	90.430.481
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	60,000,000	57,370,000	50,000,000	49,830,000	-	-
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,819,716,000	1,372,626,857	979,506,000	675,507,772	-	-
Layanan Perkantoran	2,906,465,000	2,065,593,436	2,944,274,000	2,290,294,081	257.760.000	37.670.000
TOTAL	245,853,112,000	155,196,284,358	140,799,234,000	130,871,232,288		

Keterangan:



: Tidak ada alokasi anggaran

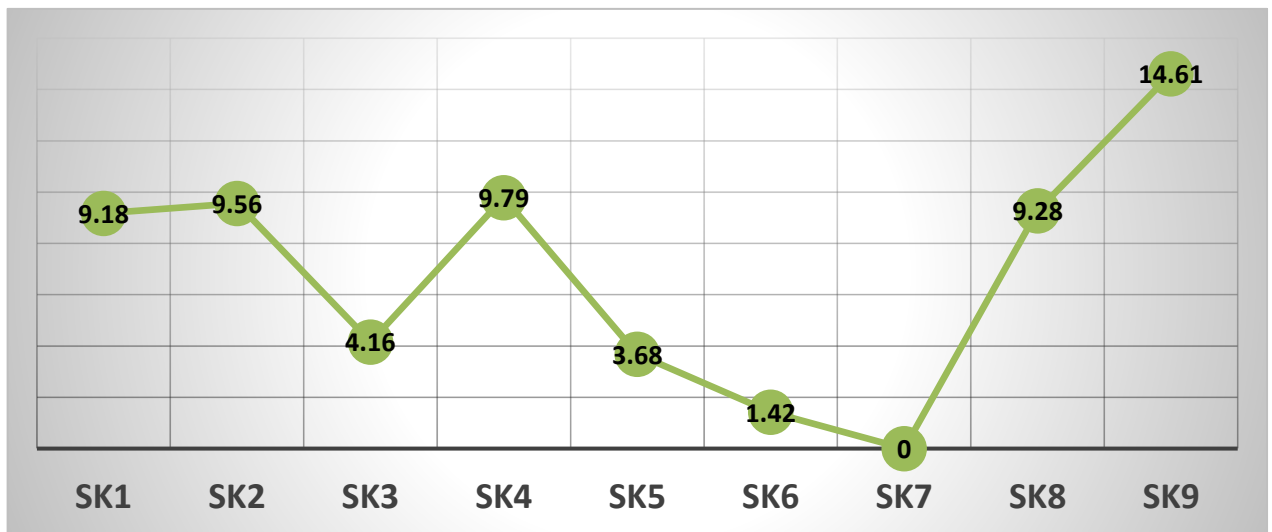
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan *resource* yang ada untuk mendukung kinerja organisasi menjadi lebih baik. Hal ini tercermin dari beberapa kebijakan dan inovasi strategis dalam pelaksanaan kegiatan.

Optimalisasi yang telah dilakukan pada triwulan I 2020, telah dimanfaatkannya armada Kapal Pengawas Perikanan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PSDKP (28 unit), untuk melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi pemantauan udara sehingga pendeteksian terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan secara ilegal dapat dilakukan secara cepat dan dikirimkan kepada kapal pengawas perikanan untuk selanjutnya dilakukan *intercept*. Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan memiliki target yang jelas pada saat operasi.

Tabel 34. Dukungan Anggaran Terhadap Sasaran Kegiatan (SK) Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

KODE	PERSPEKTIF/SASARAN/INDIKATOR KINERJA/ALOKASI	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
TOTAL				
SK1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1.989.585.000	182.564.507	9,18%
SK2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	202.877.520.000	19.404.345.660	9,56%
SK3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	54.330.072.000	2.260.503.452	4,16%
SK4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	381.662.824.000	37.361.213.500	9,79%
SK5	Terwujudnya ASN Direktorat Jenderal PSDKP yang kompeten, profesional dan berintegritas	2.206.959.000	81.107.374	3,68%
SK6	Terselenggaranya penyusunan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP	457.010.000	6.480.000	1,42%
SK7	Terselenggaranya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses	-	-	-
SK8	Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima	405.831.000	37.670.000	9,28%
SK9	Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel	257.760.000	37.670.000	14,61%



Gambar 7. Grafik efisiensi penggunaan anggaran terhadap Indikator Kinerja

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa SK7: Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel, termasuk kategori **paling efektif** karena SS terlaksana namun tidak ada anggaran yang dikeluarkan nol rupiah. Untuk SS yang memakai anggaran cukup tinggi periode triwulan I 2020 adalah SK9: Tersedianya kebijakan bidang Pemantauan dan Operasi Armada sesuai kebutuhan.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan I 2020

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan I 2020 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada triwulan I 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja. Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2020 sebanyak 29 butir. Target pencapaian untuk periode triwulan I 2020 sebanyak 11 butir. Dari target 11 butir IKU/IK tersebut sebanyak 10 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana hanya 1 IK yang belum mencapai sesuai target yaitu:

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA, dengan justifikasi :

- a. Adanya revisi halaman III DIPA Satker Direktorat POA;
- b. Adanya ketidakpatuhan data kontrak terhadap regulasi;
- c. Rendahnya penyerapan anggaran; dan
- d. Performa penyelesaian tagihan.

Dari aspek kinerja pelaksanaan anggaran, Direktorat POA memperoleh nilai **8.88%** dari target Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar **17,89%** nilai ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat POA periode triwulan I 2020 belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
a) Memastikan pelaksanaan anggaran periode triwulan II 2020 berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana aksi pencapaian kinerja	a) Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sesuai dengan revisi anggaran. b) Melakukan rapat evaluasi bulanan terkait rencana aksi pencapaian kinerja.